

► FILM INDONESIA

Tak Sekadar Urusan Pasar

Harapan para pencinta film agar dunia gambar bergerak di Indonesia terus berkembang pada masa mendatang dapat dilihat dari peningkatan jumlah penonton. Tercatat pada 2017, jumlah penonton film Indonesia mencapai rekor baru yakni 41 juta.

Ilman A. Sudarwan
redaksi@bisnis.com

Perolehan angka ini tentunya cukup membanggakan para insan perfilman. Sayangnya, tidak ada jaminan jika tingginya jumlah penonton dapat selaras dengan kualitas film. Contoh yang paling pas menggambarkan hal tersebut adalah film *Ayat-ayat Cinta 2*. Film ini banyak mendapatkan kritikan pedas dari para kritikus film tetapi tetap moncer dengan perolehan 2,5 juta penonton hanya dalam jangka waktu 3 pekan.

Sosiolog Indonesia Ariel Heryanto mengatakan bahwa peningkatan

kualitas film harus dibahas lebih detail. Selama ini banyak khalayak yang berkulat pada peningkatan jumlah penonton saja, dan melupakan kualitas.

“Soal peningkatan mutu agak rumit, dan perlu dibahas lebih jauh, tidak bisa tidak, kita perlu bicara apa kriterianya. Tentu, soal kriteria sulit dikaitkan dengan jumlah penonton,” tutur Pengajar Universitas Monash Australia ini.

Menurutnya, dua hal tersebut bergantung pada seberapa kondusifnya ekosistem perfilman Indonesia.

Ekosistem perfilman yang baik menjadi syarat muncul-

nya film-film berkualitas yang pada ujungnya akan menjadi magnet para *moviegoers*.

Ekosistem yang baik meliputi berbagai hal yakni pendidikan perfilman, kualitas penonton, distribusi film, dan sistem pengarsipan, serta festival film.

“Yang perlu kita bicarakan bukan sekadar mutu satu atau dua film. Yang perlu kita bicarakan adalah sebuah ekosistem perfilman yang sehat, kreatif dan etis. Film dan penonton hanya merupakan sebagian unsur-unsurnya,” katanya.

EKOSISTEM MEMBAIK

Ketua Asosiasi Produser Indonesia Fauzan Zidni sepakat bahwa peningkatan jumlah penonton film nasional pada tahun lalu tidak dapat diartikan bahwa kualitas film sudah lebih baik. Menurutnya, data peningkatan jumlah penonton hanya membuktikan bahwa produksi film Indonesia dapat diterima dengan baik oleh khalayak.

Berdasarkan data Aprofi, pada tahun lalu dari total 113 judul film yang beredar, jumlah film Indonesia yang mendapatkan penonton di atas 100.000 orang meningkat menjadi 45,13%. Jumlah film yang pe-

nontonnya di bawah 100.000 orang turun dari 75% pada tahun sebelumnya, menjadi 54,87% pada 2017. “Artinya sudah lebih banyak film Indonesia yang laku dan bisa balik modal. Berbeda dengan 2016 di mana jumlah penonton film lokal hanya berpusat di segelintir film saja. Saya pikir ekosistemnya terus membaik saat ini,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, tambahannya, terutama pada akhir tahun, film Indonesia mampu bersaing dengan film kelas berat dari Hollywood seperti *Star Wars: The Last Jedi* dan *Jumanji*.

Fauzan mengungkapkan, dalam 10 hari terakhir pada Desember 2017, hampir dua pertiga layar di seluruh Indonesia diperuntukkan untuk film produksi sineas nasional. “Artinya, film kita sudah lebih mendapat kepercayaan dari manajemen bioskop,” ujarnya.

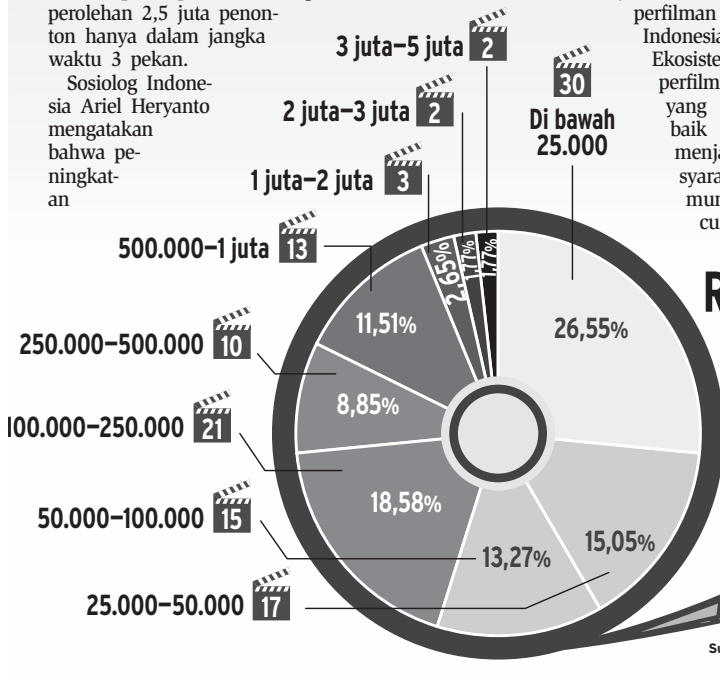
Ditilik dari muatan lokal, banyak film yang mengambil cerita yang mengangkat realitas masyarakat

di daerah.

Terbukanya ruang untuk suara dari daerah ini semakin lebar karena banyak film dengan tema-tema tersebut mampu menyabet penghargaan di ajang internasional. Misalnya film *Martina*, dan film *The Seen and Unseen (Turah)* berhasil menembus ajang bergengsi seperti Toronto Film Festival, Cannes Film Festival, hingga Academy Awards.

Fauzan sepakat dengan Ariel bahwa ekosistem perfilman Indonesia masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah kualitas dan kuantitas institusi pendidikan perfilman Indonesia yang masih jauh dari kata cukup. Selama ini, produksi film di Indonesia masih banyak mengandalkan nama aktor dan sutradara yang itu-itu saja.

“Tentu masalahnya adalah tenaga kerja. Jika kita ingin memproduksi lebih banyak film dan baik mutunya, masalahnya ada pada tenaga kerja. Sistem pendidikan filmnya harus lebih baik lagi,” jelasnya.



► PEKERJA KREATIF

Di Balik ‘Nikmatnya’ Jam Kerja Fleksibel

Wike D. Herlinda
wike.dita@bisnis.com

“Manusia memang tidak ada puasnya.”

Kalimat itu sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, saat mengomentari keinginan seseorang setelah melihat kondisi atau pencapaian orang lain. Padahal, sendirinya sudah diberkahi dengan kehidupan yang cukup mapan.

Tidak jarang kita mendengar ‘pekerja kantor’ yang ingin banting setir dan terjun ke dunia kerja yang tidak terikat jam pabrik atau kantor, karena memiliki ekspektasi tinggi soal kebebasan, independensi, dan kerenggangan ikatan dinas atau komitmen.

Pekerjaan-pekerjaan kreatif seperti jurnalis, seniman, *freelancer*, desainer grafis, dan sebagainya yang terlihat seolah-olah memiliki jam kerja yang fleksibel menjadi impian banyak orang—khususnya generasi muda—belakangan ini.

Akan tetapi, di balik citra tersebut, terselip fakta bahwa pekerja di sektor nonmanufaktur kerap kali menghadapi persoalan kesehatan yang serius dibandingkan dengan mitra mereka yang bekerja teratur pada jam kantor. Sayangnya, fakta tersebut jarang diekspose ke muka publik.

Contoh sederhana yang cukup sering terjadi adalah seorang pekerja kreatif dengan jam terbang tinggi dan himpitan *deadline* kerja yang sangat ketat seringkali abai terhadap jadwal makan dan istirahat. Ujung-ujungnya, tak sedikit dari mereka yang tidak sadar terjangkit penyakit kronis.

Jam kerja yang fleksibel di kalangan pekerja kreatif kerap kali berbanding lurus dengan gangguan kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman dan komitmen yang lebih serius di antara penyelenggara kerja untuk mewujudkan ekosistem kerja yang sehat dan kondusif.

Apalagi, pemerintah terus bergerak untuk memaksimalkan bonus demografi, dimana tenaga kerja produktif Indonesia diperkirakan

akan tumbuh menjadi 64% dari jumlah populasi. Jika bonus demografi ini digarap dengan baik, Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia.

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama proyek tersebut menjadi sangat krusial. Pengelolaan yang dimaksud tidak melalui soal peningkatan keahlian dan kompetensi, tetapi menjangkau ke masalah kesehatan dan keselamatan dalam ekosistem pekerja kreatif.

Bersinggungan dengan bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nasional selama 12 Januari–12 Februari 2018, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menggelar festival *Work Life Balance* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja kreatif.

Acara yang diselenggarakan di Gedung Joang ’45 Menteng, Jakarta itu juga diselenggarakan paralel di kota-kota lain selama Februari, yaitu di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Terkait dengan festival tersebut, Ketua Sindikasi Ellena Ekarahendy menjelaskan kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat kerja terus meningkat dan tidak diikuti dengan jaminan hukum dan instrumen turunannya yang memadai dalam menghadapi dunia kerja pada era digital.

“Sebagai sebuah serikat pekerja, Sindikasi melihat bulan K3 sebagai momentum yang tepat untuk mendialogkan kemungkinan-kemungkinan solusi bagi kondisi-kondisi yang dialami pekerja nonmanufaktur,” ujarnya.

Dia mengatakan festival tersebut membedah soal peluang, tantangan, kesehatan, dan keselamatan kerja dalam ekonomi digital.

Topik lain yang diulas dalam pergelaran tersebut adalah isu tukar tambah (pe) kerja maya dan kesehatan mental

pekerja digital.

“Seluruh rangkaian acara dapat diikuti secara terbuka, tidak hanya oleh para pelaku atau penggiat ekonomi kreatif, tetapi juga untuk siapapun elemen masyarakat yang tertarik mengetahui geliat dan dinamika di sektor ini,” kata Ellena.

Selain mencari solusi bagi pekerja kreatif, festival tersebut dapat menjadi ruang berekspresi bagi awak industri media dan kreatif, yang meski sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi masa depan Indonesia, masih harus menghadapi sejumlah kerentanan.

RENTAN DEPRESI

Di balik industri kreatif yang tumbuh 43% pada tahun lalu dan menyerap lebih dari 15,9 juta tenaga kerja pada 2016, tersimpan fakta memprihatinkan bawasannya para pekerja kreatif lebih rentan mengalami depresi akibat kecenderungan *overwork*.

Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Jepang, misalnya, tercatat 96 pekerja kreatif tewas karena sakit dan 93 bunuh diri dan percobaan bunuh

diri akibat gangguan mental karena terlalu banyak bekerja atau yang disebut *karoshi*.

Menurut Ellena, pekerja nonmanufaktur di Indonesia juga kerap mengalami gejala gangguan psikologis yang serupa. Banyak pekerja kreatif yang terbiasa dengan lembur karena tidak adanya sistem yang memproteksi jam kerja mereka. Bahkan, tidak sedikit yang dibayar dengan upah minimalis.

Koordinator Lembaga pemerhati K3 Local Initiative for OSH Network Wiranta Yudha Ginting menambahkan, pemerintah belum memiliki koridor proteksi yang mumpuni untuk melindungi para pekerja kreatif yang lebih banyak bergerak di ranah informal.

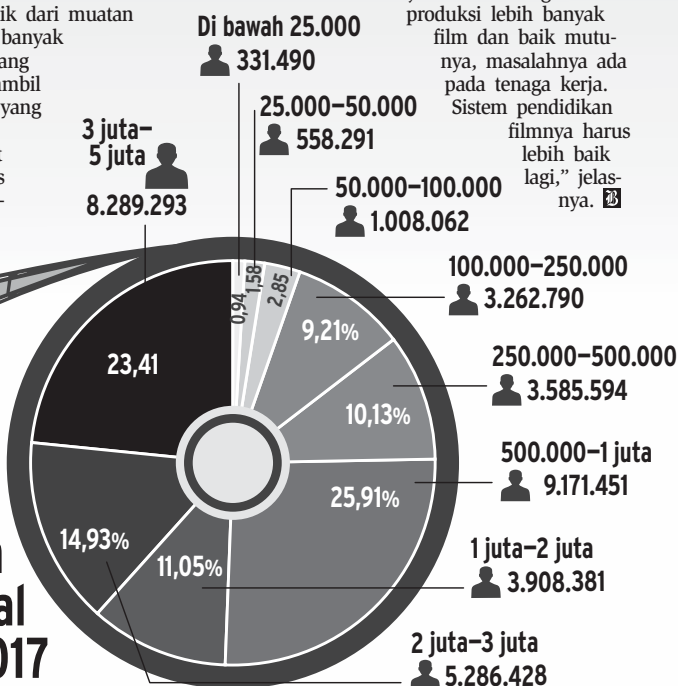
Padaahal, masalah *overwork* di seluruh negara Asia semakin menjadi isu kritis yang harus segera dituntaskan. Untuk itu, dia mengusulkan adanya pendefinisian ulang hubungan ketenagakerjaan di sektor kreatif; seperti definisi ulang tempat kerja dan *job description*.

Organisasi Buruh Dunia (International Labor Organization/ILO) mencatat 26,3% pekerja di Indonesia bekerja selama lebih dari 49 jam dalam sepekan. Padahal UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan hanya membolehkan maksimal jam kerja adalah 40 jam/pekan.



Bisnis/Tri Utomo

Rekapitulasi Jumlah Penonton Film Nasional 2017



► PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Saat Wanita Berada di Depan

Dika Irawan
dika.irawan@bisnis.com

Menilik kehidupan rumah tangga, menjadi lumrah melihat pria berperan sebagai kepala keluarga. Namun, di dunia modern sekarang ini justru perempuan berperan sebagai kepala keluarga.

Banyak alasan yang membuat perempuan bertukar peran dengan pria dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil dari Survei Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PeKka) pada 2017 tercatat dalam empat keluarga terdapat satu keluarga yang dikepalai oleh perempuan. Survei tersebut dilakukan di 111 desa dan 17 provinsi di Indonesia.

Pengurus Pekka Fitria Villa Sahara mengatakan, alasan perempuan menjadi kepala keluarga karena beberapa faktor mulai dari suami meninggal dunia, bercerai, belum menikah, hingga suami tidak bekerja.

Dari sisi legalitas, keberadaan kepala keluarga perempuan belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal itu tertuang dalam Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam beleid itu disampaikan bahwa kepala keluarga adalah suami atau laki-laki, dan hal ini tercermin dalam seluruh sistem sosial, ekonomi dan politik yang berlaku.

“Kepala keluarga perempuan di Indonesia *kan* tidak mendapat pengakuan legal formal. [Padahal] realitasnya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga. Mereka juga perlu diperhatikan,” tuturnya.

Tidak mengherankan jika kemudian perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga sering di-diskriminasi dalam kehidupan sosial politiknya.

Hasil survei tersebut juga memperlihatkan hampir separuh atau 49% keluarga dengan kepala keluarga perempuan berada di tingkat kesejahteraan terendah. Selain itu, perempuan kepala rumah tangga itu juga berpendidikan formal rendah. Tercatat 57% buta huruf.

Dari sisi pendapatan, mereka banyak bekerja di sektor informal dengan pendapatan rata-rata Rp10.000 per hari.

PEMBERDAYAAN EKONOMI

Terkait hal tersebut, Fitria menga-

takan, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menghilangkan diskriminasi perempuan adalah pendekatan ekonomi.

Selama ini, sebagian besar perempuan yang menjadi kepala rumah tangga bekerja di sektor informal seperti industri rumahan. Di sini, mereka dapat diberikan keterampilan tambahan seperti mengolah barang, mengemas, dan memasarkan.

Penguatan secara ekonomi tersebut sangat diperlukan sehingga para perempuan dapat mandiri secara ekonomi.

Jika tujuan tersebut tercapai maka para perempuan memiliki posisi tawar dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga.

Eko Novi Ariyanti, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), menilai kemandirian secara ekonomi bagi perempuan kepala keluarga juga berpengaruh dalam pencegahan kekerasan. “Pencegahan itu lebih penting sebelum terjadinya kekerasan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, ketika perempuan dapat mandiri secara ekonomi maka memiliki daya tawar di depan suaminya. Dengan demikian, suami akan berpikir dua kali sebelum melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Beda halnya bila perempuan tersebut tidak memiliki kemandirian ekonomi. Biasanya mereka enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya karena sangat bergantung pada suami.

“Jika mereka [perempuan] mandiri secara ekonomi, mereka bisa menuntut suaminya. Dengan kata lain, hal itu akan mengurangi tekanan kekerasan terhadap perempuan,” ujar.

Salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian PP-PA untuk melindungi perempuan kepala rumah tangga adalah pengembangan industri rumahan di sejumlah daerah.

Eko mengklaim program yang digulirkan sejak 2016–2017 telah membantu perempuan kepala rumah tangga agar lebih mandiri secara ekonomi. “Sifatnya pengembangan ekonomi perempuan,” katanmya.

Sebanyak 14 kabupaten dan kota dipilih untuk melaksanakan pengembangan industri rumahan, a.l. Kabupaten Cilegon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Wonosobo.